

MEMBANGUN PARADIGMA BARU EKONOMI ISLAM UNTUK PENANGGULANGAN PENGANGGURAN

Dalmeri

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Jl. Nangka No. 58C Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan 12530
Email: dalmeri300@gmail.com

Abstract: **Building New Paradigm in Islamic Economics to tackle unemployment.** The economic crisis that hit Indonesia since 1997 is still challenging, while in other Asian countries has shown development which evidenced by the economic recovery in various economic sectors and the increasing in capital income is far better than the Indonesian capital income. Other part of Asian countries has increased their employment while in Indonesia has not yet improved. The catastrophic of Economic Crisis in Indonesia causing many losses, increasing unemployment, increasing the crime. Economists claimed that the capitalist system is suspected to be system which caused the economic crisis. Based on this, Islamic Economic could be as an alternative and hoped to be the answer to tackle the challenges in future world. The article try to analyze new Islamic economic paradigm to tackle the unemployment.

Keywords: Islamic Economics, justice, unemployment

Abstrak: **Membangun Paradigma Baru Ekonomi Islam Untuk Penanggulangan Pengangguran.** Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 belum dilihat akan atas, sementara di negara-negara Asia lainnya telah menunjukkan perkembangan dengan pemulihan ekonomi yang terlihat di berbagai sektor pertumbuhan ekonomi meningkat dengan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk jauh melebihi pendapatan perkapita rakyat Indonesia. Bersama dengan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan jauh lebih terbuka, sementara di Indonesia itu adalah dengan cara lain. Krisis ekonomi yang telah menyebabkan banyak kerugian, meningkatnya pengangguran, meningkatnya kejahatan. Para ekonom berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis dengan sebuah sistem yang menarik adalah yang dicurigai sebagai penyebab krisis ekonomi. Berdasarkan hal ini, sistem ekonomi Islam dari perkawinanya mulai sebagai salah satu alternatif, dan diharapkan untuk menjawab tantangan-tantangan di dunia di masa depan, terutama sehubungan dengan Ayub membuka maksud yang luas. Karya ini mencoba untuk menganalisa paradigma baru ekonomi Islam untuk mengatasi pengangguran.

Kata kunci: Ekonomi Islam, keadilan, pengangguran

Pendahuluan

Dunia telah mengalami polarisasi dengan adanya dua kekuatan sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari sistem ekonomi kapitalis,¹ sedangkan sistem ekonomi sosialis diwakili oleh Rusia dan Eropa Timur, Cina, serta Indocina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua sistem ekonomi ini lahir dari dua muara ideologi yang berbeda. Hampir semua bagian

dunia dan seluruh wilayah sejarah, sistem-sistem ekonomi yang dilandaskan pada ketamakan telah mengalami kebuntuan dalam melahirkan keadilan.² Sistem-sistem semacam itu biasanya berakar pada ekstrem-ekstrem ideologis yang kurang berhasil mengantarkan kondisi ekonomi yang lebih baik bagi seluruh partisipan. Pada skala global, banyak orang menolak Kapitalisme tanpa regulasi dan Sosialisme ekstrem, serta Neoliberalisme yang telah berjasa melahirkan kemiskinan dan pemiskinan struktural dalam jumlah masif.

Kapitalisme dalam bentuk klasiknya *laissez*

¹ Ariza Fuadi dan Purbayu Budi Santosa, "Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 12, No. 1 (Maret 2015), h. 2.

² Asnaini, *Islamic Social Finance: Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 24. No. 1, Juni 2014, h. 4.

faire telah runtuh, yang masih bertahan adalah Kapitalisme yang telah dimodifikasi. Kapitalisme berasumsi bahwa dalam sistemnya terdapat suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dan *fair* dalam perekonomian. Dengan tidak adanya mekanisme yang jelas dan pemuasan keinginan secara serampangan, pendapatan tidak didistribusikan secara merata, sebab ketidakmerataan dalam pewarisan kekayaan berkaitan dengan akses yang tidak adil terhadap fasilitas kredit dan pendidikan, perbedaan bakat, stamina fisik, latar belakang keluarga, dan ambisi pribadi. Ketidakmerataan memungkinkan kelompok berpendapatan tinggi memperoleh bagian pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan kuantitas mereka.

Melalui cara ini konfigurasi barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sistem pasar tidak selaras dengan keinginan mayoritas konsumen. Kesenjangan pendapatan yang besar diterima sebagai wajar dan tak terhindarkan. Ini merupakan ketidakadilan yang nyata, namun dirasionalisasi dengan argumen bahwa seseorang yang memikirkan diri sendiri telah melahirkan situasi ini merupakan "kekuatan sosial yang perlu dan bermanfaat."³

Sementara itu, Sosialisme dan Marxisme sebagai antitesis dari Kapitalisme juga tak dapat diandalkan. Ideologi ini bahkan mengalami kemunduran lebih cepat dari yang diprediksikan. Ini disebabkan kelemahan-kelemahan utama yang inheren di dalamnya. *Pertama*, ideologi ini mengimplikasikan ketidakpercayaan pada kemampuan manusia untuk mengelola kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan kesejahteraan sosial. *Kedua*, mesin kekuasaan negara dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat. Dalam praktik yang terjadi sebaliknya, sekelompok orang yang mengendalikan kekuasaan negara memanfaatkan kekayaan dan pendapatan negara untuk kepentingan mereka sendiri. *Ketiga*, subsidi umum yang besar hanya menguntungkan si kaya dan orang-orang istimewa dibanding si miskin yang daya belinya terbatas.⁴

³ George Soule, *Ideas of the Great Economists*, New York: Mentor, h. 53. Bandingkan juga dengan George Dalton (1974), *Economic System and Society*, (Kingsport dan Tenn: Kingsport Press, 1955), h. 77.

⁴ Norman Furniss dan Timothy Tilton, *The Case of Welfare State: From Social Security to Social Equality*, (Bloomington, Indiana:

Tujuan utama Sosialisme adalah menegakkan keadilan, namun pada praktiknya Sosialisme hanya mengurangi sedikit ketidakmerataan atau menimbulkan ketidakadilan yang lain. Kaum buruh yang tidak mempunyai hak milik tetap menjadi buruh tanpa hak milik, mereka bekerja pada majikan yang lebih berkuasa. Mereka juga tidak mempunyai hak untuk memilih, semua tergantung pada pimpinan. Perjuangan akan hak-hak buruh akan berujung pada penjara atau kematian. Dengan demikian, negara Sosialis jauh lebih mematikan daripada Kapitalisme. Alienasi para pekerja dari sarana-sarana produksi masih tetap terjadi, karena pusat kendali dipisahkan dari pekerja dan ini berimplikasi terhadap sempitnya lapangan pekerjaan. Praktik semacam ini bertentangan dengan ajaran Marx sendiri tentang bagaimana alienasi terjadi: yakni ketika pekerjaan terpisah dari pekerjaannya dalam arti pekerjaan bukan milik si pekerja sehingga dalam pekerjaannya ia tidak mengafirmasi dirinya sendiri bahkan menolak dirinya sendiri; dan pekerja terasing dari pekerjaannya muncul ketika pekerjaan itu bukan miliknya namun milik orang lain.⁵ Dengan cara demikian, kemungkinan eksploitasi sebagaimana terdapat dalam Kapitalisme, yang menjadi sasaran kritik oleh Sosialisme itu sendiri, masih hidup.

Ada tawaran dalam bentuk sistem keadilan *welfare state* sebagai langkah maju dari Kapitalisme. Tujuan sistem ini adalah melunakkan eksese Kapitalisme yang berlebihan dan dengan cara ini dapat mengurangi daya tarik Sosialisme. Sistem ini cukup menarik semua lapisan masyarakat, baik pekerja maupun kapitalis. Dari segi filosofinya, *welfare state* meyakini bahwa kesejahteraan individu merupakan tujuan yang sangat penting yang tidak mungkin tergantung hanya pada operasi kekuatan-kekuatan pasar; kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmampuan seseorang dalam memperoleh lapangan pekerjaan tidak mesti merupakan bukti dari kegagalannya. Karena itu, sistem ini mengakui *full employment* (sebagaimana juga

International Union Press, 1977), h. 42.

⁵ Pembahasan tentang alienasi ini dalam Karl Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, (Moscow: Foreign Language Publishing House, 1961), hh. 67-83.

dipercaya Kapitalisme) dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagai bagian dari tujuan pokok kebijakan negara. Meski sistem ini menerapkan strateginya melalui enam perangkat negara—regulasi, nasionalisasi industri pokok, gerakan buruh, kebijakan fiskal, pertumbuhan yang tinggi dan *full employment*—subsidi umum telah melahirkan kepincangan yang tidak adil antara si kaya dan si miskin.

Setelah terjadinya krisis Kapitalisme selama 25 tahun terakhir dan semakin berkurangnya tingkat profit yang berakibat jatuhnya akumulasi kapital, meneguhkan tekad korporasi besar untuk kembali ke sistem liberalisme. Melalui *corporate globalization* mereka merebut kembali ekonomi dan berhasil mengembalikan paham Liberalisme, bahkan dalam skala global. Inilah yang disebut sebagai paham Neoliberalisme. Sejak 1970-an Keynesianisme yang menjadi fondasi *welfare state* telah masuk dalam catatan kaki sejarah.

Realitas menunjukkan dalam perjalanannya, kedua sistem ekonomi tersebut gagal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia, akibat dampak sistem yang dikembangkannya. Karena kegagalan tersebut, maka para pendukung kedua sistem tersebut melakukan modifikasi terhadap kedua sistem itu. Sistem ekonomi kapitalis dimodifikasi menjadi sistem ekonomi selain menampilkan bentuk aslinya yaitu mengutamakan kebebasan individu dalam kepemilikan faktor-faktor produksi, juga memasukkan variabel asas distribusi keadilan ke dalam sistem ekonominya.⁶

⁶ Salah satu karya monumental mengenai asas distribusi keadilan ini ditulis oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*. Dia menganggap bahwa persaingan antara pemilik modal yang kuat akan menguasai pasar sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis yang menganut sistem pasar bebas (*free market*) sehingga para pesaingnya dari kalangan yang memiliki modal kecil (lemah) tidak akan bisa berbuat banyak dalam sistem perekonomian kapitalis yang menganut sistem pasar bebas. Karena itu, menurut John Rawls negara harus ikut andil dalam mengatur kebijakan terutama berkaitan dengan pendistribusian ekonomi pada rakyat kecil yang tidak memiliki modal kuat dengan melindungi mereka dari para pemilik modal besar dalam melakukan sebuah transaksi ekonomi. Lihat John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h. 61-62. Pola yang ditawarkan oleh John Rawls ini ternyata tidak banyak berlaku di wilayah Indonesia, terbukti dengan pesatnya pertumbuhan swalayan-swalayan raksasa seperti Matahari Super Market, Carrefour, Alfa Super Market, dan lain sebagainya, yang memaksa usaha kecil serta pasar tradisional untuk gulung tikar karena tidak mampu bersaing para pemilik modal besar yang menawarkan tempat perbelanjaan yang nyaman

Sedangkan sistem ekonomi sosialis dimodifikasi menjadi Neososialis dengan kecenderungan ke arah mekanisme pasar.

Meskipun modifikasi dari kedua sistem telah dilakukan, kedua sistem ekonomi yang dianggap lebih baru tersebut belum mampu untuk mencari solusi untuk keluar dari krisis dan problematika dunia seperti inflasi, krisis moneter internasional, problematika utang negara berkembang, pengangguran yang merajalela, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran kritis dari berbagai kalangan untuk menemukan sistem ekonomi dunia yang dapat mensejahterakan masyarakat atas dasar keadilan dan persamaan hak. Di antara gagasan-gagasan tersebut yang mendapat banyak perhatian oleh berbagai kalangan para pakar ekonomi adalah sistem ekonomi Islam. Bagaimana paradigma ekonomi Islam yang dianggap sebagai alternatif tersebut, pada aspek saja sistem ekonomi Islam bisa memberikan solusi bagi krisis ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama di Indonesia, yang berimplikasi terhadap meluasnya pengangguran pada semua lini akan dibahas dalam tulisan ini dengan pendekatan filosofis.

Gagasan tentang Ekonomi Islam Sebagai Alternatif

Sistem ekonomi Islam sebagai salah satu cabang dari ilmu ekonomi Islam memandang bahwa keberlangsungan persoalan dalam hal ini krisis ekonomi nasional pada dasarnya karena ada sesuatu kebijakan yang salah. Menurut M. Umer Chapra, kesalahan yang umumnya dilakukan yaitu bahwa akar permasalahannya hanya dicari pada gejala (*symptom*), seperti ketidakseimbangan anggaran, ekspansi moneter yang berlebihan, neraca pembayaran yang begitu besar, naiknya kecenderungan proteksionis, tidak memadainya bantuan asing, dan kerjasama internasional yang tidak mencukupi. Akibatnya, penyembuhan hanya bersifat sementara dan beberapa saat, kemudian krisis muncul kembali, bahkan lebih mendalam dan serius.⁷

sekaligus menghibur.

⁷ M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, (London: United of Kingdom, 1995), h. 43.

Diduga permasalahan mendasar dari krisis ekonomi nasional adalah karena penerapan tingkat bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat *indirect screening mechanism*. Berbagai literatur yang ditulis oleh para ekonom seperti Muslehuddin (1974), Qureshi (1979), Kahf (dalam Khurshid, 1981), Siddiqi (1981), Chapra (1985 dan 1986), Maurice Allais (1993), Mills dan Presley (1997), dan Choudry dan Mirakhor (1997) tidak menyetujui perekonomian yang bertumpu pada *interest rate* karena akan terjadi misalokasi sumber daya yang pada gilirannya cenderung akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Enzler Conrad dan Johnson (sebagaimana dikutip oleh Chapra, 1996) menemukan bukti kuat bahwa di AS telah terjadi misalokasi dana modal di antara sektor-sektor ekonomi dan jenis modal. Dengan terjadinya misalokasi dana yang disebabkan oleh suku bunga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dari suatu negara, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi yang optimum, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.⁸

Sistem ekonomi berbasis bunga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan karena penyaluran pinjaman dengan bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam memberikan jaminan kredit guna meng-cover pinjaman yang diberikan dan kecukupan *cash flow* untuk memenuhi kewajibannya. Dikarenakan hal tersebut, maka dana akan mengalir cenderung pada golongan kaya yang umumnya mampu memenuhi syarat jaminan tersebut.⁹ Namun, golongan kaya umumnya memanfaatkan dana pinjaman itu tidak hanya untuk investasi yang produktif, tetapi juga untuk *conspicuous consumption* (konsumsi barang-barang mewah, barang yang hanya untuk simbol status dan pengeluaran yang tidak bermanfaat) dan spekulasi. Hal ini mengakibatkan cepatnya ekspansi *money demand* untuk keperluan yang non-produktif dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat, yang pada gilirannya mem-

perkecil ketersediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pembangunan. Keadaan ini akan membuat golongan miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok karena sulitnya golongan ini memenuhi syarat tersebut di atas dan terlebih lagi dengan semakin berkurangnya dana untuk kebutuhan pokok tersebut, ditambah lagi dengan sulitnya mereka memperoleh lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penyaluran pinjaman yang sedemikian rupa mengakibatkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan.¹⁰ Selanjutnya, dari sisi pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pola *conspicuous consumption* ini akan menyebabkan masyarakat mengurangi tingkat tabungannya, sehingga akan meningkatkan suku bunga, menurunkan kualitas maupun kuantitas investasi, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.¹¹

Selain itu, manajemen ekonomi berbasis bunga juga akan mengakibatkan tingginya ketidakpastian pada pasar keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap pencapaian stabilitas dalam perekonomian. Sebagaimana dinyatakan oleh Milton Friedman dan L.A. Iacocca. Milton Friedman mengatakan bahwa faktor penyebab perekonomian AS begitu sukar diperkirakan adalah karena perilaku suku bunga yang sama-sama tidak bisa diperkirakan. L.A. Iacocca, pemimpin perusahaan Chrysler Corporation, mengamati bahwa suku bunga telah menjadi sedemikian mudah berubah sehingga tak seorang pun dapat melakukan perencanaan untuk masa depan.¹²

Tingginya tingkat perubahan pada suku bunga menginjeksikan ketidakpastian yang besar dalam pasar investasi sehingga mendorong *borrower* dan *lender* mengalihkan tujuan pasar mereka, dari tujuan pasar utang jangka panjang kepada pasar utang jangka pendek yang berbau spekulasi, sehingga secara fundamental mengubah

⁸ M. Umer Chapra, *Towards...*, h. 44.

⁹ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2015), h. 14.

¹⁰ Mulya E. Sregar, "Manajemen Moneter Alternatif dan Penerapannya di Indonesia," dalam *Bulletin Ekonomi dan Moneter*, Bank Indonesia, Vol. 2, No. 3, (1999), h. 24.

¹¹ Sjahrir, *Analisis Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 1995), h. 117.

¹² Harry Shutt, *Runtuhnya Kapitalisme*, terj. Hikmat Gumilar, (Jakarta: Teraju 2005), h. 31.

keputusan-keputusan investasi para pelaku bisnis. Di mana pelaku bisnis lebih senang mengambil keuntungan pada pasar-pasar komoditi, saham, valuta asing, dan keuangan.¹³ Kondisi seperti ini akan membuat pasar-pasar tersebut semakin aktif dan memanas yang merupakan salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dunia saat ini cenderung bergerak kepada ketidakseimbangan penguasaan aset dan sumber daya ekonomi, yang menjadikan kelompok kaya menjadi semakin kaya, dan kelompok miskin semakin miskin.¹⁴ Fakta tersebut paralel dengan kenyataan di banyak negara Muslim, di mana strategi *trickle down effect* yang dahulu begitu diagung-agungkan oleh para pakar ekonomi, ternyata hanya menghasilkan kesenjangan sosial yang luar biasa besar.

Beberapa waktu lalu *The New Economics Foundation* (NEF) meneliti hubungan pertumbuhan pendapatan per kapita dengan proporsi atau *share* dari pertumbuhan tersebut yang dinikmati oleh kaum miskin. Hasil riset lembaga yang berkedudukan di Inggris tersebut menunjukkan bahwa pada dekade 1980-an, dari setiap kenaikan 100 dolar AS pendapatan per kapita dunia, maka kaum miskin hanya menikmati 2,2 dolar AS, atau sekitar 2,2 persen. Artinya, 97,8 persen lainnya dinikmati oleh orang-orang kaya.

Kemudian, antara tahun 1998 hingga 2008, kesenjangan tersebut makin menjadi-jadi. Setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 100 dolar AS, maka persentase yang dinikmati oleh orang-orang miskin hanya 60 sen saja, atau sekitar 0,6 persen. Sedangkan sisanya, yaitu 99,4 persen, dinikmati oleh kelompok kaya dunia. Ini menunjukkan adanya penurunan *share* kelompok miskin sebesar 70 persen.¹⁵

Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh *Bank for International Settlement* (BIS), total turnover perdagangan valuta asing mencapai \$1, 230 miliar per hari kerja pada bulan April 2005,

yang berbeda jauh dibandingkan pada bulan April 1998 yang masih \$620 miliar per hari kerja. Allais juga menemukan bahwa *speculative cash flow* dari negara-negara G-7 adalah 34 kali dibandingkan *flows* untuk transaksi perdagangan barang maupun jasa. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen ekonomi berbasis bunga mengakibatkan ketidakstabilan bagi perekonomian secara keseluruhan karena efeknya yang positif terhadap peningkatan kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif.¹⁶

Suku bunga, baik yang tinggi maupun yang rendah, implikasinya sangat berpengaruh terhadap kesehatan perekonomian. Suku bunga yang tinggi akan merugikan pengusaha dan dalam perekonomian kapitalis suku bunga merupakan penghambat utama investasi dan formasi modal. Akibat dari tingkat bunga yang tinggi tersebut antara lain menurunkan tingkat produktivitas, kesempatan kerja, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Tingkat suku bunga yang rendah juga sama jeleknya. Kalau tingkat suku bunga yang tinggi akan merugikan pengusaha, maka tingkat suku bunga yang rendah akan merugikan penabung terutama penabung kecil yang menginvestasikan dana pada instrumen berbasis bunga. Tingkat bunga yang rendah akan merangsang pinjaman untuk tujuan-tujuan konsumsi, baik sektor publik maupun swasta, karena itu akan meningkatkan tekanan inflasioner. Selain itu, tingkat bunga yang rendah akan mendorong investasi-investasi yang tidak produktif dan meningkatkan spekulasi pada bursa dan pasar komoditas. Suku bunga yang rendah juga akan mendorong kegiatan investasi yang terlalu menghemat tenaga kerja sehingga akan menimbulkan pengangguran. Karena itu, hal ini akan menimbulkan distorsi pada harga modal, tingkat bunga yang rendah telah merangsang konsumsi yang bersifat inflasioner, mengurangi rasio tabungan kotor, menurunkan kualitas investasi, dan menciptakan kelangkaan modal.

Ekuilibrium yang diharapkan dimana suku bunga tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, hanyalah impian para teoretikus dan para pengamat ekonomi yang sekarang sudah mejadi

¹³ Harry Shutt, *Runtuhnya...*, h. 38.

¹⁴ Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, terj. Martin Aleida, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia KPG, (2002), h. 84.

¹⁵ Harry Shutt, *Runtuhnya...*, h. 36.

¹⁶ Mulya E. Sregar, "Manajemen...", h. 14.

birokrat atau staf ahli menteri yang senantiasa melihat pertumbuhan ekonomi dari aspek pertumbuhan angka-angka, tidak melihatnya dari realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Maka dari itu, menurut Umer Chapra, obat terbaik bukanlah sekadar mereduksi suku bunga saja karena hal ini tidak akan menghilangkan ketidakpastian masa depan, mengingat adanya defisit anggaran yang tinggi di beberapa negara industri utama.¹⁷ Jika hal itu terjadi mengindikasikan adanya persoalan ketidakadilan ekonomi yang sangat signifikan, sehingga dibutuhkan adanya suatu konsep ekonomi yang lebih menjamin rasa keadilan masyarakat, pada aspek ini para pakar berupaya untuk menggali sistem yang terdapat dalam ekonomi Islam.

Pertanyaannya, apakah keadilan ekonomi yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan prinsip “sama rata, sama rasa” seperti yang dulu pernah menjadi sangat populer dalam sistem sosialis-komunis? Tentu saja, yang penulis maksud bukanlah keadilan dalam konteks tersebut. Bagaimanapun juga, kaya dan miskin adalah *sunnatullah*. Artinya, Islam mengakui bahwa perbedaan itu eksis—termasuk perbedaan dalam kekayaan—menjadi bagian dari fenomena kehidupan seluruh masyarakat, tak terkecuali masyarakat Islam.

Permasalahannya sekarang adalah, apakah perbedaan penguasaan aset itu (baca: kemiskinan) muncul sebagai akibat proses alami, misalnya karena rasa malas, ataukah sebagai akibat ketidakadilan sistem? Dalam konteks ini, harus diakui bahwa faktor utama penyebab perbedaan tersebut adalah akibat ketidakadilan sistem. Karena itu, kemiskinan yang ditimbulkannya—dalam bahasa Didin Hafidhuddin—adalah kemiskinan struktural. Maka dari itu, diperlukan adanya paradigma pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan distribusi ‘kue’ pembangunan.¹⁸

Keadilan Ekonomi untuk Mengatasi Problematika Pengangguran

Sistem perekonomian dalam Islam yang bebas bunga, kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat non-produktif seperti spekulasi kurang begitu berarti karena diharamkannya penggunaan instrumen bunga dalam aktivitas perekonomian. Sedemikian rupa sehingga dalam sistem ekonomi Islam, permintaan akan dana untuk investasi merupakan bagian dari permintaan transaksi total dan akan bergantung pada kondisi perekonomian dan laju keuntungan yang diharapkan dan tidak ditentukan di depan. Mengingat harapan terhadap keuntungan tidak mengalami fluktuasi harian atau mingguan seperti suku bunga, maka permintaan agregat kebutuhan transaksi cenderung relatif lebih stabil. Sehingga kecepatan peredaran uang dapat diperkirakan perilakunya secara lebih baik.

Karena itu, variabel yang dipakai dalam suatu kebijakan ekonomi dalam sistem perekonomian Islam adalah cadangan uang (*stock of money*) daripada suku bunga. Tujuan dari kebijakan ekonomi Islam adalah menjamin bahwa ekspansi moneter tidak bersifat “kurang atau berlebihan”, tetapi cukup untuk sepenuhnya mengeksplorasi kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang dan jasa bagi kesejahteraan yang berbasis luas. Laju pertumbuhan yang dituju harus bersifat berkesinambungan, realistis, serta mencakup jangka menengah dan panjang, dan tidak kurang realistis dan sukar diperkirakan.¹⁹

Dengan tidak adanya suku bunga, uang beredar dapat diatur oleh Bank Sentral menurut kebutuhan sektor riil perekonomian dan sasaran-sasarannya bisa menjangkau semua elemen masyarakat termasuk golongan miskin melalui pembukaan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat dapat diatur untuk merealisasikan sasaran kesejahteraan yang lebih luas dengan suatu laju pertumbuhan yang optimal, tetapi realistis dalam konteks stabilitas harga. Target dalam perkembangan ekonomi masyarakat akan dapat dicapai dengan menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan dalam *high-powered money* melalui

¹⁷ M. Umer Chapra, *Towards...*, h. 46.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 29.

¹⁹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute SEBI, 2001), h. 65.

suatu kombinasi defisit fiskal dan pinjaman *mudharabah* oleh Bank Sentral kepada lembaga-lembaga finansial.

Jadi, dengan dihapuskannya instrumen bunga dalam manajemen ekonomi akan mengurangi salah satu sumber utama ketidakpastian dalam perekonomian. Karena bunga adalah akar dari ketidakpastian dan ketidakpastian adalah sumber utama inefisiensi ekonomi dan terutama akan menyulitkan dalam melakukan *forecasting*. Secara sederhana, keuntungan dari manajemen moneter bebas bunga antara lain:

- a. Manajemen moneter bebas bunga akan membantu pertumbuhan yang lebih sehat dalam uang beredar.
- b. Manajemen moneter bebas bunga akan meminimalkan permintaan uang untuk keperluan yang tidak esensial dan *mubazir* serta pembiayaan bagi proyek-proyek yang meragukan dan sia-sia.
- c. Manajemen moneter bebas bunga akan menimbulkan peningkatan dalam aliran pembiayaan bagi tujuan-tujuan produktif disamping distribusinya yang luas di kalangan sejumlah pelaku bisnis dan memperbaiki alokasi di antara berbagai sektor ekonomi.
- d. Instabilitas yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan dalam suku bunga dan fluktuasi dalam pengeluaran agregat, akan dapat dikurangi secara substansial.

Dengan demikian, sistem ekonomi bebas bunga akan menciptakan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang akan menimbulkan suatu dimensi yang sehat dalam perekonomian dengan keterkaitan yang kuat antara sektor moneter dan sektor riil. Jika diamati fakta yang berkembang sekarang ini, maka akan ditemukan fakta antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi seolah-olah terdapat kontradiksi dan pertentangan. Sebab persoalan utama dalam perekonomian adalah bagaimana menjawab problem kelangkaan sebagai akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia (sumber daya, modal, tenaga kerja dan manajemen). Kebutuhan dasar manusia terbentang dari kebutuhan yang sifatnya individual (*private*

goods) seperti sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan publik (*public goods*) seperti pendidikan, kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁰ Dua bentuk kebutuhan tersebut merupakan sarana kehidupan yang tak terelakkan. Untuk memastikan keseimbangan dua kebutuhan tersebut, penggunaan dan penguasaan serta faktor-faktor produksi, serta proses produksi harus berada dalam kerangka keadilan. Jika satu faktor meningkat, maka faktor yang lain akan turun. Bagaimana sebenarnya posisi Islam terkait hal ini?

Sumber daya alam adalah sarana utama dalam produksi guna memenuhi kebutuhan dasar manusia yang sifatnya universal. Dalam ajaran Islam diyakini bahwa sumber daya itu tersedia dalam kadar yang “cukup” untuk memenuhi kebutuhan manusia dan seluruh makhluk non-manusia. Namun sumber daya itu tidak dapat mencukupi keinginan-keinginan manusia yang rakus dan tanpa batas.

Pandangan Islam tentang sumber daya berbeda dengan keyakinan dari Prinsip Libertarian dan Rawlsian. Kaum Libertarian percaya bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas dan karenanya tidak penting untuk dipertimbangkan dalam faktor pembangunan dan pendapatan nasional. Dua faktor yang menentukan pembangunan dan pendapatan nasional adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja dan modal. Sementara itu, Prinsip Rawls yang menjadi dasar bagi *welfare state* meyakini sumber daya itu barang langka, namun tetap tidak diperhitungkan dalam faktor-faktor pembangunan dan pendapatan nasional. Dengan demikian, dua prinsip di atas pada hakikatnya sama-sama tidak menaruh kepedulian atas faktor sumber daya sebagai bagian penting dalam menentukan kelanjutan pembangunan dan pendapatan nasional.

Islam juga mengenal konsep tentang modal, yakni segala sesuatu yang melibatkan campuran tangan manusia dan penggunaan sumber daya alam dalam proses produksi. Secara kategoris bahwa kekayaan hasil tangan manusia sebagai modal dapat dibedakan secara bertingkat menjadi

²⁰ Heny Yuningrum, “Polemik Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Sumber Devisa Negara (Problematisasi Tenaga Kerja Indonesia Dari Segi Islami).” *Economica*, Vol. 2, No. 2 (Nopember 2010): 62.

tiga tingkatan sebagaimana dalam ungkapan Al-Qur'an: *Al-Rizq*: kekayaan/modal sebagai faktor produksi yang masih mungkin di dalamnya terdapat unsur atau cara memperoleh yang halal dan atau haram; *Al-Fadl*: kekayaan/modal sebagai faktor produksi yang diusahakan melalui cara-cara yang halal, inilah yang disebut sebagai "modal bebas korup"; dan *Al-Tayyibah*: kekayaan/modal sebagai faktor produksi yang memiliki 3 indikator: Dari segi *substansinya* ia tidak bercampur antara yang halal dan haram, tidak membahayakan jiwa dan akal, dan banyak manfaatnya. Dari segi *cara memperolehnya* halal. Dari segi dampaknya, ia peduli pada *kelestarian lingkungan*, menjamin kelangsungan keanekaragaman hayati, swasembada pangan, bebas polusi udara dan air, dan sanitasi lingkungan. Inilah yang disebut sebagai "modal bebas korup dan ramah lingkungan".

Tiga hierarki modal di muka, memperkuat prinsip Alquran tentang pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak dikenal dalam prinsip keadilan manapun. Campuran manusia atas sumber daya sebagai faktor produksi perlu memperhitungkan secara cermat ketersediaannya secara lestari. Karena itu, modal sebagai intervensi manusia yang juga merupakan faktor produksi mesti memasukkan pertimbangan cara-cara intervensi yang benar dan memiliki dampak positif bagi lingkungan.

Ketersediaan sumber daya alam tidak ada manfaatnya bila manusia sendiri tidak produktif. Sumber daya alam akan memberikan kegunaan dengan daya dukung aktivitas produksi. Islam mengandaikan berbagai macam aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, perdagangan, industri, dan pekerjaan dalam berbagai profesi. Secara eksplisit Alquran menyebutkan istilah kerja dengan *kash*. Pekerja akan produktif jika ia memiliki etos kerja yang tercermin dalam *ikhtiar*, yakni kebebasan manusia untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Alquran, kemudian, menegaskan bahwa manusia hidup untuk bekerja sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai pemakmur dunia. Karena itu, tidak ada jalan yang lebih baik untuk memenuhi fungsi kekhalifahan ini melainkan berbuat ihsan, mengisi waktu dengan kerja profesional dan aktivitas produktif.

Profesionalisme dan produktivitas kerja manusia juga dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Untuk mencapai suatu kehidupan sosial-ekonomi yang berkeadilan diperlukan motivasi individu yang benar sebagai suatu mekanisme filter yang baik.

Sementara itu, Prinsip Libertarianisme, kepentingan pribadi adalah motivasi utama bagi individu untuk memaksimalkan efisiensi sementara persaingan akan berperan sebagai pembatas kepentingan pribadi dan membantu menjaga kepentingan sosial. Libertarianisme hanya percaya bahwa keadilan dan efisiensi dapat dicapai jika dan hanya jika secara otomatis dengan mengejar kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Karena dua kepentingan ini tidak selalu selaras, memungkinkan orang-orang kaya untuk menyelewengkan sumber daya yang langka guna memenuhi keinginan-keinginan mereka yang tidak penting bahkan mengorbankan pemenuhan barang-barang untuk kepentingan mereka yang kurang beruntung. Prinsip Egalitarianisme Radikal mengasumsikan bahwa mengejar kepentingan pribadi mesti akan merugikan kepentingan sosial; jalan keluarnya diusulkan agar kepentingan pribadi dihapuskan dan dikontrol oleh negara untuk mengawal kepentingan sosial. Egalitarianisme mencegah individu mengejar kepentingan pribadi, ia memaksa dirinya dari mekanisme agar individu bekerja secara efisien.

Prinsip Alquran secara tegas mengasumsikan bahwa kepentingan pribadi tidak selalu merupakan motivasi yang buruk. Kepentingan pribadi akan berbahaya bagi masyarakat jika melampaui batas-batas kemanusiaan dan tidak diarahkan untuk menciptakan suatu masyarakat yang menjadikan persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi sebagai tujuan utamanya. Ada mekanisme yang efektif di sini dan perlu diciptakan untuk mendorong individu agar bekerja demi kepentingan masyarakat, sembari mengakui bahwa kepentingan pribadi adalah suatu keniscayaan. Keseimbangan antara dua kepentingan ini digariskan oleh Alquran melalui prinsip tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*).

Sebagai akibat perbedaan etos kerja, bakat bawaan dan ketrampilan yang diajarkan, "per-

bedaan” pada prinsipnya merupakan keniscayaan dan hakikat dari kehidupan alamiah yang tak bisa ditolak. Perbedaan merupakan pijakan nyata untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Kaya dan miskin, majikan dan buruh, pemilik dan penggarap tanah, atasan dan bawahan, adalah dua status dan fungsi dalam relasi ekonomi “kemitraan”. Yakni suatu relasi kerjasama dan partisipasi, saling memanfaatkan untuk keuntungan bersama, bukan hubungan atas bawah yang berbingkai eksploitasi dan opresif.

Hubungan antara tenaga kerja atau buruh dan modal selalu mewarnai kegiatan ekonomi. Hubungan keduanya sering menimbulkan konflik dan ini sudah lama terjadi dalam dunia per-ekonomian. Konflik semacam ini menghasilkan dampak buruk yang rumit. Hingga kini konflik industri belum pernah diatasi secara substansial oleh Prinsip Libertarian. Sementara itu, Prinsip Egalitarianisme Radikal terlalu mengedepankan protes dalam hubungan antara tenaga kerja dan modal. Karl Marx mengembangkan teori nilai dan surplus nilai. Menurut teori nilai, nilai komoditas apa pun merupakan hasil kaum pekerja dan karenanya produk-produknya harus dibagi secara sosial. Modal adalah sekumpulan jasa tenaga kerja pada masa lalu dan menjadi hak pekerja.²¹ Kapitalis menjual komoditas di pasar dengan harga yang sama dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi. Pada saat yang sama, pekerja tetap hidup subsistens. Akibatnya, surplus nilai hanya dinikmati kaum Kapitalis. Ini tentu saja melahirkan eksploitasi tenaga kerja oleh modal.²²

Persoalan ini bersumber dari kenyataan bahwa kepemilikan dan penguasaan modal hanya menjadi hak bagi kapitalis. Sementara tenaga kerja tidak berpartisipasi dalam proses penguasaan faktor-faktor produksi. Tenaga kerja sebagai bagian dari faktor produksi tidak dihitung sebagai penyertaan modal oleh kaum Kapitalis. Karenanya eksploitasi tidak dapat terelakkan. Ajaran Islam mencoba memberikan solusi atas konflik industri

berbasis relasi tenaga kerja dan modal melalui prinsip kemitraan yang termanifestasi dalam dua bentuk kerjasama, yakni *musharakah* dan *mudharabah*. Dua bentuk kerjasama ini pada dasarnya merupakan cerminan dan manifestasi dari prinsip keadilan (*`adl*), altruisme (*ihsan*) dan meritokrasi (*nasib*).

Keadilan juga harus menjadi kerangka proses produksi. Oleh karena kebutuhan harus terus tersedia sepanjang masa, proses produksi perlu mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomi, utamanya kelestarian sumber daya alam yang dapat menjamin kesinambungan spesies manusia dan non-manusia. Ekologi, dengan demikian, perlu berada di dalam kalkulasi aktivitas produksi, dan aktivitas ekonomi pada umumnya. Rasionalitas ini menyadarkan bahwa efisiensi dalam aktivitas produksi adalah terbatas dan bergantung kepada kondisi-kondisi yang berada di luar ekonomi itu sendiri.

Karena itu, Alquran menegaskan relasi yang seimbang (*tawazun*) antara manusia dan alam. Alam bukanlah proyek *promethean* (seperti prinsip Libertarian), yang menjadi “objek” bagi manusia. Bumi ini diciptakan menjadi hak bagi semua komunitas makhluk yang ada di dalamnya. Mempertimbangkan sumber daya alam dan lingkungan serta hak-hak ekologis dari spesies di luar manusia, proses produksi yang melibatkan teknologi perlu memperhatikan kelestarian dan mempertahankan keseimbangan ekologis yang dibutuhkan untuk kehidupan dan memihak kepada perkembangan dan otonomi dari individu-individu dan komunitas-komunitas yang bersifat ramah lingkungan. Alquran menyebutnya dengan ungkapan “bersyukur”, agar negeri yang damai dan sejahtera, *baldah tayyibah*, dapat menjadi kenyataan.

Sesungguhnya, analisis terhadap konsep pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas dalam literatur-literatur ekonomi Islam klasik. Salah satunya yang terkenal adalah konsep pertumbuhan yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun (w. 1406 M./808 H.), seorang ulama besar abad XIV M. dalam bukunya *Muqaddimah*. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *umran* (pembangunan).²³

²¹ Karl Marx dan Friedrich Engel, *Capital: Manifesto of the Communist Party*, (Chicago: Encyclopaedia of Britannica Inc., 1952), h. 85-95.

²² M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi: Idarah-I Adabiyyat-I Delli, 1980), h. 129-131.

²³ Rus'an, *Ibn Khaldun tentang Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), h. 85.

Teori tersebut muncul ketika Ibn Khaldun menganalisis proses kemunculan dan kejatuhan sebuah dinasti (baca: pemerintahan negara). Ibn Khaldun mengatakan bahwa ketika populasi mengalami pertumbuhan, maka akan terjadi *surplus of labor* (kelebihan tenaga kerja). Kemudian dengan adanya pembagian kerja dan kerja sama antar-*labor*, maka *output* akan meningkat. Peningkatan *output* ini akan mendorong peningkatan pendapatan. Sebagai implikasinya, naiknya pendapatan akan meningkatkan permintaan sosial (atau permintaan agregat dalam istilah modern), yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi.²⁴

Namun demikian, tingginya pertumbuhan ini—jika tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat lemah—akan menimbulkan ketidak-seimbangan pasar yang mengancam perekonomian itu sendiri. Apalagi jika kondisi tersebut diperparah oleh adanya kolusi antara penguasa dan pengusaha dalam menguasai aset negara. Inilah bentuk monopoli ekonomi yang sangat berbahaya. Sehingga tidaklah mengherankan, jika Ibn Taimiyah (w. 1328 M./728 H.) dan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 1350 M./751 H.) sangat mengecamnya.²⁵ Inilah sistem yang akan mengakibatkan perputaran aset dan harta hanya berada di tangan satu golongan atau kelompok *saja*, padahal Allah Swt. sangat membencinya.

Bahkan, Al-Maqrizi seorang ilmuwan Mesir yang hidup di abad XV M. menegaskan lebih lanjut bahwa perputaran harta di tangan segelintir kelompok itu merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya *ghila* (inflasi). Padahal masyarakat banyaklah yang harus menanggung akibatnya. Daya beli mereka menjadi turun dan nilai riil uang mereka menjadi berkurang. Ia pun kemudian mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang paling dirugikan oleh dampak inflasi ini, yaitu kelompok *fixed-income people*.²⁶

²⁴ Charles Issawi, *Filsafat Islam tentang Sejarah*, terj. A. Mukti Ali, (Jakarta: Tintamas, 1962), h. 99.

²⁵ Abdullah Ahmed Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 274.

²⁶ M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics, from Altruism to Cooperation to Equality*, (New York: St. Marten's Press 1997), h. 76.

Tingginya inflasi yang terjadi negara Indonesia dan semakin melemahnya daya beli masyarakat merupakan bukti yang sangat *valid*. Keterkaitan antara inflasi dan monopoli—di mana monopoli merupakan sumber inflasi sebagaimana yang diungkap al-Maqrizi—adalah suatu diskusi yang sangat dihindari oleh para ekonom kapitalis. Alasannya sederhana, karena hal tersebut akan mengancam kedudukan kaum kapitalis itu sendiri yang saat ini mendominasi dunia. Bahkan, kalau mau jujur, dunia saat ini berada di bawah kendali dan dominasi perusahaan-perusahaan multinasional. Merekalah yang mendikte arah perekonomian global saat ini. Penulis sependapat dengan Abdurrahman Yusri, pakar ekonomi syariah asal Mesir, yang menyatakan bahwa al-Maqrizi layak untuk dianugerahi gelar sebagai *monetarist* pertama di dunia.²⁷

Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa paradigma baru yang ditawarkan oleh ekonomi Islam berkaitan dengan masalah keadilan distribusi dalam perekonomian di tengah masyarakat, namun hal ini bukan berarti sama dengan penyamarataan pendapatan, karena hal tersebut tidak mungkin dan tidak sesuai dengan *sunnatullah*. Dalam sistem perekonomian Islam hal yang penting untuk dilakukan adalah mengurangi kesenjangan pendapatan dengan menjamin keadilan bagi setiap anggota masyarakat untuk berusaha, termasuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta adanya akses yang lebih jelas bagi mereka untuk melaksanakan kegiatan ekonomi bila peluang kerja yang layak bisa mereka peroleh. Pada aspek inilah urgensinya peran pemerintah untuk dapat bertindak jujur dan adil. Menurut penulis ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

Pertama, mengembangkan sistem zakat, infak, dan *shadaqah* secara nasional sebagai instrumen yang mampu “memaksa” aliran kekayaan ke tangan kelompok *dhu’afa* di kalangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia asumsi ini masih menunggu

²⁷ Syed Nawab Haider Nagvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, (London: The Islamic Foundation, 1981), h. 23.

langkah konkret pemerintah Republik Indonesia pasca-deklarasi Gerakan ZIS Nasional pada bulan Ramadhan lalu.

Kedua, melindungi hak-hak tenaga kerja dari eksploitasi berlebihan dengan mengembangkan konsep *share economy*. Selama ini, yang selalu menjadi andalan negara Indonesia untuk mempertahankan daya saing dalam perekonomian global adalah dengan mempertahankan upah murah tenaga kerja (UMR), seakan-akan tidak ada jalan lain. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia perlu membuat regulasi agar para pekerja dapat memperoleh *share* yang lebih adil, misalnya dengan menaikkan UMR atau meminta perusahaan memberikan 10 persen sahamnya kepada para pekerjanya. Terhadap perusahaan pun pemerintah harus bersikap adil, misalnya dengan menghilangkan berbagai pungutan liar yang membebani *cost* perusahaan dan meminimalisasi regulasi yang tidak kondusif untuk investasi.

Ketiga, melindungi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah, termasuk memberikan dukungan fasilitas pelatihan dan pembiayaannya. Dalam hal ini, pemerintah harus secara pro-aktif mendorong sistem perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-bank untuk lebih terlibat dalam pengembangan usaha kecil menengah, terutama yang berada di wilayah-wilayah pinggiran kota dan pedesaan. Tentu saja perlu diciptakan regulasi yang jelas dan transparan.

Keempat, secara konsisten memerangi segala bentuk kolusi dan korupsi yang merusak, yang telah mengakibatkan *high-cost economy*, termasuk menghilangkan *privilesee* yang berlebihan kepada segelintir perusahaan-perusahaan besar tertentu. *Wallahu'alam*. DM.

Pustaka Acuan

Asnaini. "Islamic Social Finance: Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Mizania*. Vol. 24. No. 1. Juni 2014.

Bamualim, C.S & I., Abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Jakarta: CSRC, 2005.

Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute SEBI. 2001.

_____. *Towards A Just Monetary System*. London: United of Kingdom. 1995.

Dalton, George. *Economic System and Society*. Kingsport, Tenn: Kingsport Press. 1974.

Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 5, No. 1. Juni 2015.

Fuadi, Ariza dan Purbayu Budi Santosa, "Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 12, No. 1. Maret 2015.

Furniss, Norman dan Timothy Tilton. *The Case of Welfare State: From Social Security to Social Equality*. Bloomington, Indiana: International Union Press. 1977.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Islahi, Abdullah Ahmed. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1997.

Issawi, Charles. *Filsafat Islam tentang Sejarah*, terj. A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas. 1962.

Lunati, M. Teresa. *Ethical Issues in Economics, from Altruism to Cooperation to Equality*, St. Marten's Press, New York. 1997.

Mallarangeng, Rizal. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, terj. Martin Aleida. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia KPG. 2002.

Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli. 1980.

Marx, Karl. *Economic and Philosophic Manuscripts of 1884*. Moscow: Foreign Language Publishing House. 1961.

Marx, Karl dan Friedrich Engel. *Capital: Manifesto of the Communist Party*. Chicago: Encyclopaedia of Britannica Inc. 1952.

Nagvi, Syed Nawab Haider. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. London: The Islamic Foundation. 1981.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press. 1997.

Rus'an. *Ibn Khaldun tentang Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Bulan Bintang. 1963.

Sahroni, Oni, Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih*

- dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, Cet. ke-2.
- Shutt, Harry. *Runtuhnya Kapitalisme*, terj. Hikmat Gumilar. Jakarta: Teraju. 2005.
- Sjahrir. *Analisis Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1995.
- Soule, George, 1955. *Ideas of the Great Economists*. New York: Mentor.
- Sregar, Mulya E. "Manajemen Moneter Alternatif dan Penerapannya di Indonesia," dalam *Bulletin Ekonomi dan Moneter*, Bank Indonesia, Vol. 2, No. 3. 1999.
- Yuningrum, Heny. "Polemik Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Sumber Devisa Negara (Problematisa TKI dari Segi Islami)." *Economica*, Vol. 2, No. 2. Nopember 2010.